

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo sudah baik, dimana capaian yang baik pada kualitas dan kuantitas kerja dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan rancangan standar pelayanan minimal. Kemudian aspek yang cukup baik yakni kemandirian dan efektivitas yang terlihat dari kemampuan pegawai yang mampu untuk memberikan pelayanan meskipun dengan keadaan fasilitas yang masih belum memadai. Sementara aspek yang kurang baik yakni ketepatan waktu dan komitmen pegawai Kantor Kecamatan Sipatana yang masih belum sesuai dengan kriteria sikap dan integritas dalam pelayanan sehingga masih perlunya peran aktif Camat dalam upaya optimalisasi pegawai dalam proses dan hasil terbaik untuk pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Kantor Kecamatan Sipatana untuk meningkatkan mutu pelayanan, agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan disarankan untuk membuat standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM),

standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Kemudian konsisten dengan strategi yang dibuat agar capaian terhadap visi dan misi kantor kecamatan dapat diwujudkan, serta dapat menerapkan Reward dan Punnishment bagi pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

2. Untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan, disarankan aparat kecamatan dapat mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem PATEN, bahkan melakukan studi banding ke daerah / kabupaten/ kota/ provinsi, yang dalam pelaksanaan pelayanan kecamatan sudah baik dan maju serta memenuhi harapan yang dibutuhkan masyarakat. Dapat memperbaiki dan memenuhi sarana prasarana dalam kemudahan pelayanan disarankan menyediakan gedung dan ruang pelayanan yang memenuhi standar pelayanan terpadu dan menyederhanakan mekanisme prosedur untuk semua jenis layanan perizinan maupun non perizinan.
3. Pentingnya pemerintah Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo melakukan upaya penguatan komitmen dari pegawai pelaksana pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dimana melakukan kegiatan bimbingan dalam menumbuhkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual agar seluruh proses dan hasil kerja dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan serta target dalam pelayanan di tingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, A. dan S.P. Djati. (2017). Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai UP PTSP Jakarta Barat. 5(2): 288-301.
- Amstrong, Michael. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Elexmedia Komputindo. Jakarta.
- Ardini, Lilis. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas. Majalah Ekonomi. No.3 Desember 20
- Brotoharsojo, Hartanto & Wungu, Jiwo, (2003), Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chabib Soleh dan Suripto. (2011). Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media.
- Dwiyanto, Agus, (2006), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
- Flippo, Edwin B. (2005). Manajemen Personalia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Handyaningrat, Soewarno. (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
- Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
- Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu). Yogyakarta: Gave Media.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN
- Mangkunegara. (2011). Manajemen Sumber Daya Perusahaan. PT . Remaja Rosda karya. Bandung.
- Miftah Thoha. (2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.

- Milen Anelli. (2004). Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas : Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja. Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Patriana, P. (2007). Hubungan Antara Kemandirian Dengan Motivasi Bekerja Sebagai Pengajar Les Privat Pada Mahasiswa Di Semarang. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prawirosentono,Suyadi. Suyadi Prawirosentono. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan”. Yogyakarta:BPFE
- Priansa, Donni Juni. (2014). Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, (2006). Manajemen Pelayanan, Jakarta: PustakaPelajar,
- Robbins, P. Stephen. (2006). Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta.
- Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.
- Sinambela, LijanPoltak.Dkk. (2011). ReformasiPelayananPublik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tandiontong, Mathius (2016). Kualitas Audit Dan Pengukurannya. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Nogi Hessel. (2005). Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Ukago, Kristianus. 2005. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Bukti Empiris di Efek Jakarta. Jurnal Maksi 5 (1): 13-33.

Jurnal Penelitian

- Idris A, Paranoa, Dahri J. (2014). Kinerja Aparatur Pada Era Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kantor Camat Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mariah, Riski. (2019). Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) Di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.
- Tamawiw, Ronaldo. (2015). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.
- Widodo Roni P, Cikusin, Agustina Y N. (2020). Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Walikota Gorontalo Kepada Camat
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah